

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Berkaitan dengan topik penelitian ini, penulis membutuhkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengkaji seberapa jauh penelitian sejenis yang telah dilakukan dan seberapa berkembang literasi mengenai topik yang berkaitan. Oleh karena itu, penulis memilih lima penelitian terdahulu yang sejenis dengan topik yang sedang diteliti.

Penelitian terdahulu pertama yang dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Kiara Sakha Dhiya Sevasty dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengangkat judul ‘Korean Wave : Diplomasi Publik dan Budaya Korea Selatan terhadap Indonesia.’ Jurnal ini dipilih karena membahas mengenai bagaimana Korean Wave menjadi alat bagi Korea Selatan untuk melakukan diplomasi publik. Sejalan dengan konsep *soft diplomacy* yang menggunakan budaya sebagai salah satu alatnya, maka Korea Selatan menggunakan fenomena Korean Wave sebagai momentum untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam bagian analisa jurnal penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana *soft power* memiliki peran dalam diplomasi untuk mempengaruhi pihak lain dengan tidak menggunakan paksaan atau kekerasan militer, melainkan memanfaatkan daya tarik. Dalam penelitian ini, penulis juga menjelaskan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia telah terjalin sejak tahun 1973 dan semakin berkembang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia dan Roh Moo Hyun sebagai presiden Korea Selatan di tahun 2006 melalui *Joint Declaration on Strategic Partnership to promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*. Sesuai dengan judulnya, penulis sangat menitik-beratkan peran Korean Wave sebagai fenomena budaya populer yang pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi elemen penting bagi Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain, seperti Indonesia.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana Korean Wave juga menjadi bagian diplomasi publik dan budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Indonesia yang dilakukan dengan cara *public to public* dalam bentuk dialog yang berlangsung *continue* sehingga dapat menghasilkan timbal balik dan meningkatkan citra baik Korea Selatan di Indonesia. Melalui jurnal ini, penulis juga menyertakan beberapa institusi yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia untuk melaksanakan diplomasi publik dan budayanya, seperti Korea Creative Content Agency (KOCCA), Korea Film Council (KOFIC), Korea Culture and Information Service (KOCIS), Korea Foundation for International Culture Exchange (KOFICE), Korea Tourism Organization (KTO), dan Korean Culture Center (KCC).

Penelitian terdahulu kedua yang dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Wahyu Zamzami dari Universitas Islam Indonesia yang mengangkat judul 'The Role of South Korea's Public Diplomacy Through Korea Foundation in Indonesia.' Dalam jurnal penelitian ini, penulis menjelaskan pada bagian *literature review* bahwa penelitian ini menggunakan diplomasi publik untuk menjawab fenomena yang sedang diteliti. Bagian pembahasan dalam jurnal ini membahas secara khusus tentang bagaimana organisasi non-profit, Korea Foundation, menjadi wadah pemerintah Korea Selatan untuk melakukan diplomasi publiknya di Indonesia. Jurnal ini dipilih sebagai jurnal terdahulu bagi penelitian yang sedang penulis jalani karena penelitian ini mencerahkan penulis tentang organisasi Korea Selatan di Indonesia yang secara aktif menjalankan diplomasi publik dan mengedukasi penulis mengenai bagaimana cara memandang organisasi tersebut menggunakan kacamata dimensi dari diplomasi publik. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa dimensi diplomasi publik menurut perspektif Mark Leonard ada tiga dimensi, yaitu manajemen informasi, strategi komunikasi, dan membangun hubungan. Ketiga hal tersebut dipenuhi oleh organisasi Korea Foundation yang mana ditandai dengan program dan kegiatan organisasi tersebut yang dapat dilihat publik melalui beberapa social media, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Penulis dari jurnal ini juga menjelaskan dengan detail berapa jumlah pengikut dan postingan yang organisasi tersebut

miliki di media sosialnya, dan program apa saja yang organisasi tersebut miliki untuk menarik minat publik di Indonesia. Contohnya seperti program Bahasa melalui King Sejong Institute Center, ASEAN Culture House Photo and Video Contest Exhibition yang mana dilakukan untuk menjalin hubungan antara Korea Selatan dan negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia, KF Global e-School yang merupakan program kuliah online dan offline mengenai studi di Korea yang bekerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri termasuk Indonesia, program Fellowship yang menyediakan program beasiswa untuk negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia, dan juga KF Virtual Dialogue yang menjadi platform bagi pemerintah Korea untuk membahas isu dan fenomena, seperti bagaimana pemerintah Korea Selatan dan Indonesia bekerja sama dalam mengatasi virus Covid-19. Tidak hanya membuat program-program, KF juga turut bekerja sama dengan banyak institusi pendidikan di Indonesia dan dari kerjasama tersebut terbentuklah beberapa lembaga yang melibatkan kedua negara tersebut, seperti Indonesia-Korea New Southern Policy Young Professionals Lab yang merupakan program yang juga didukung oleh Korean Foundation dan FPCI untuk mengumpulkan ide-ide brilian pemuda Indonesia dari berbagai bidang yang berfungsi sebagai platform untuk melibatkan para pembuat kebijakan dari Indonesia dan Korea. Dari jurnal ini, terlihat bagaimana keberhasilan Korea Selatan dalam melakukan diplomasi publiknya melalui kerjasama dengan berbagai pihak non-negara, program pendidikan dan beasiswa, serta program budaya lainnya yang juga melibatkan media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter dalam menyebarkan informasi program dan kegiatannya.

Penelitian terdahulu ketiga yang dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Vita Fitria, Haekal Adha Al Giffari, Daffa Al Falah, dan Muhammad Zul Razin yang berjudul 'Analyzing the practice of South Korea's public diplomacy in Indonesia: An approach with communication pyramid of public diplomacy.' Dalam jurnal penelitian ini, penulis mengatakan bahwa diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia tidak terlepas dari fenomena Hallyu atau Korean Wave. Korean Wave merupakan elemen penting dari soft power untuk menumbuhkan antusiasme publik di Indonesia terhadap Korea Selatan. Dalam jurnal ini, penulis

juga memaparkan bagaimana stereotip negatif dari negara Korea Selatan yang dahulu pernah mengalami perang Korea, kelaparan, dan ketidakstabilan politik seketika hilang dengan munculnya budaya populer. Dalam aspek diplomasi publiknya, penulis membahas mengenai lingkup pengetahuan sebagai salah satu jalur bagi Korea Selatan untuk melakukan diplomasi publik di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan institusi Korean Language Exchange (KLE) sebagai lembaga yang mewadahi pegawai negeri Indonesia yang bekerja di lembaga publik untuk memiliki kesempatan belajar bahasa Korea. Selain itu, ada juga Universitas Nasional dan King Sejong Institute Jakarta Center yang menyediakan pendidikan bahasa Korea, sekaligus berperan penting dalam mendorong promosi budaya Korea Selatan di Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu jalur bagi Korea Selatan untuk menimbulkan kesadaran, pengakuan, dan mengarahkan orang Indonesia untuk mencari informasi lain tentang Korea Selatan. Korea Selatan memanfaatkan keingintahuan intelektual publik dalam memperluas pengaruh dan budayanya. Selain itu, ada pula Korean International Cooperation Agency (KOICA) yang memiliki tujuan strategis dalam pelaksanaannya untuk mendorong diplomasi publik melalui berbagai proyek untuk mempengaruhi negara target. Dalam penulisannya, peneliti juga membahas tentang bagaimana publik Indonesia atau menjurus ke para remaja penggemar budaya populer Korea sebagai bentuk dari diplomasi publik, namun di satu sisi hal tersebut mengurangi rasa minat remaja terhadap budaya dalam negeri.

Penelitian terdahulu keempat yang dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Dew Gede Sudika Mangku dan Ni Nyoman Larasari yang berjudul 'Korean Wave's Role In Strengthening South Korea-Indonesia Diplomatic Relations.' Di bagian pembahasan dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa Korea Selatan menerapkan diplomasi budaya untuk menyebarkan budaya dan kebutuhan pasar di Indonesia. Dikatakan juga bahwa Hallyu sebagai bentuk instrumen pelaksanaan diplomasi budaya juga memberikan pengaruh positif bagi Korea Selatan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga membahas bagaimana upaya Korea Selatan untuk masuk ke beberapa sektor di Indonesia, seperti sektor pendidikan, makanan, dan juga gaya

bermusik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hallyu merupakan bentuk dari Soft Diplomacy Korea Selatan di Indonesia. Unsur budaya populer membuat Korea Selatan dengan mudah mencapai negosiasi kesepakatan dan hal tersebut merupakan salah satu kebijakan Korea yang tertulis dalam Buku Putih Diplomatik tahun 2008 dari Kementertian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan. Budaya merupakan jalur non-formal Korea Selatan untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia dan mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam penelitian ini juga ditegaskan bahwa kemajuan teknologi dan media massa menjadi faktor pendukung Korea Selatan dalam melancarkan strategi penyebaran budayanya di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa diplomasi budaya Korea Selatan tidak dapat jauh dari pengaruh publik dan kemajuan digital.

Penelitian terdahulu kelima yang mana merupakan penelitian terdahulu terakhir yang dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Puspa Marlinda yang berjudul 'Diplomasi Budaya Korea Selatan di Indonesia.' Dalam jurnal penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia dengan mengambil periode tahun 2002 hingga 2017. Pembahasan dimulai dari bagaimana dinamika sejarah hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang mulai masif sejak ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership to promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* oleh kedua Kepala Negara di Jakarta pada saat kunjungan Roh Moo-Hyun, Presiden Republik Korea ke Indonesia pada tanggal 4 Desember 2006. Deklarasi tersebut menciptakan kesepakatan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hukum. Lalu dilanjutkan pada masa pemerintahan Moon Jae In di tahun 2017 yang membentuk *Special Strategic Partnership* dalam bidang akselerasi industrialisasi di Indonesia. Lalu pembahasan juga dilanjutkan dengan sejarah hubungan diplomatik bidang sosial budaya antara Korea Selatan dan Indonesia, sarana diplomasi budaya dalam hubungan antara keduanya (pariwisata, olahraga, pendidikan, seni, perdagangan), bagaimana bentuk-bentuk penerimaan diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia (K-Pop, Makanan, Musik, Drama, Film), dan juga bagaimana respon publik Indonesia terhadap diplomasi budaya Korea Selatan yang pada

penjelasannya memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru, ruang hiburan, serta investasi di Indonesia.

2.2 Tinjauan Teori

Dalam mengkaji dan menganalisa penelitian “Diplomasi Publik Pemerintah Korea Selatan Dalam Memperkenalkan Budaya di Indonesia Melalui Media Sosial Periode Tahun 2019-2022” ini, penulis menggunakan teori Diplomasi Publik dengan melihat apa relevansi penelitian dengan teori yang diterapkan, serta bagaimana teori tersebut akan dioperasionalkan pada penelitian.

2.1.1 Diplomasi Publik

Ilmu hubungan internasional mengenal konsep *power* dalam membangun hubungan antar negara. Hubungan internasional yang didasari oleh kepentingan nasional membutuhkan *power* untuk mencapainya. Dalam definisinya umum, *power* atau kekuatan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan³⁶. Dalam mempengaruhi perilaku pihak lain, seorang aktor hubungan internasional harus mengetahui apa kecenderungan dari pihak lain³⁷.

Dalam mempengaruhi perilaku pihak lain, umumnya metode-metode yang digunakan ialah metode yang bersifat keras, seperti koersif, bayaran, dan daya tarik³⁸. Metode koersif dan bayaran digunakan pada *Hard Power*, sementara itu daya tarik digunakan pada *Soft Power*. *Soft Power* merupakan kemampuan untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan melalui daya tarik³⁹. Melalui tulisannya yang berjudul “*Soft Power*” dalam jurnal *Foreign Policy* No. 80, Joseph Nye berpendapat bahwa *power* tidak lagi dalam bentuk paksaan atau kekerasan yang jauh

³⁶ Joseph S Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs New York. Hal.16.

³⁷ Ibid.,

³⁸ Joseph S Nye. 2009. *Get Smart Journal: Combining Hard and Soft Power*. The Council on Foreign Relations.

³⁹ Ibid.,

sebelumnya diyakini oleh kaum tradisional⁴⁰. Menurut Nye, pandangan kaum tradisional yang hanya fokus pada kekuatan militer tidak akan mampu menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat kontemporer⁴¹.

Soft Power lebih dari sekedar kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain dengan cara negosiasi atau argumen, melainkan *Soft Power* justru memiliki kekuatan yang menghasilkan daya tarik⁴². Daya tarik tersebut dihasilkan dari tiga sumber, yaitu budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri suatu negara⁴³. Menurut Nye, *Soft Power* juga dapat beroperasi baik secara langsung antara pemerintah, atau sebagai alternatif, yaitu pada lingkungan yang memungkinkan seorang aktor mendapatkan kepentingannya⁴⁴.

Dalam penelitian ini, pemerintah Korea Selatan memanfaatkan *Soft Power*-nya dalam aspek budaya untuk meraih kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain. Korea Selatan mengambil *Soft Power* sebagai strategi kekuatan menengah di saat posisi ekonomi dan militernya berada di posisi yang lemah dan melihat kesuksesan budaya populernya, *Hallyu*, sebagai sumber kekuatan alternatif yang menggantikan *hard power* untuk bersaing dengan negara lain⁴⁵. Korea Selatan memobilisasi *Hallyu* untuk kepentingan nasionalnya dan membuat Masyarakat global memandang Korea Selatan sebagai negara yang menarik untuk diketahui. Citra Korea Selatan tidak hanya diterima biasa, namun juga direkonstruksi dan menjadi persepsi yang bertahan lama bagi pengaruhnya dalam mempengaruhi kapasitas diplomatik⁴⁶.

⁴⁰ Joseph S Nye. 1990. *Soft Power*. Foreign Policy No. 80.

⁴¹ Ibid,.

⁴² Joseph S Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs New York. Hal.19.

⁴³ Ibid, Hal. 25.

⁴⁴ Craig Hayden. 2012. *The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts*. Lexington Books, United Kingdom. Hal. 45.

⁴⁵ Sook Jong Lee, Jan Melissen. 2011. *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia*. Palgrave Macmillan, New York. Hal. 140.

⁴⁶ Ibid, Hal. 141.

Nilai-nilai budaya populer yang dimiliki oleh Korea Selatan membuat mereka memiliki keunggulan tersendiri dalam ber-diplomasi dengan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu perangkat Soft Power yang digunakan Korea Selatan untuk mewujudkan kepentingannya adalah melalui diplomasi publik. Definisi diplomasi publik menurut Paul Sharp adalah proses yang melalui hubungan langsung antara masyarakat dan suatu negara yang berupaya untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai suatu negara yang diwakili oleh masyarakat⁴⁷. Lalu, definisi lain menurut Hans Tuch tentang diplomasi publik adalah proses berkomunikasi dengan publik asing dalam upaya mewujudkan pemahaman terhadap gagasan dan cita-cita bangsa, lembaga, budaya, dan kebijakan nasional suatu negara⁴⁸.

Diplomasi publik juga disebut sebagai '*nation-branding*' yang melalui proses komunikasi tukar informasi dan gagasan kepada publik asing dengan maksud untuk mengubah sikap publik terhadap negara mereka dan memperkuat elektabilitas suatu negara di hadapan murid⁴⁹. Diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh dari sikap publik dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Negara yang menerapkan diplomasi publik melibatkan opini publik dan interaksi dengan publik dalam membangun hubungannya dengan negara lain. Diplomasi public dipengaruhi oleh dua studi, yaitu studi komunikasi dan studi globalisasi⁵⁰. Diplomasi publik membangun dialog antara negara dan publik. Menurut pemikiran Jurgen Habermas, dialog yang terbuka antar negara dapat dilakukan demi menjaga perdamaian⁵¹. Diplomasi publik membuka kesempatan bagi suatu negara untuk membentuk dan mendapatkan opini publik yang positif berkaitan dengan kepentingan nasional yang ingin

⁴⁷ Jan Melissen. 2005. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. PALGRAVE MACMILLAN, New York. Hal. 11.

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 11.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 16.

⁵⁰ Iva Rachmawati. 2016. *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara*. Calpulis. Hal. 8.

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 9.

dicapai. Secara tidak langsung, diplomasi publik dianggap sebagai diplomasi yang berusaha menjangkau perspektif aktor negara mau pun aktor non-negara dalam hubungan internasional.

Kata ‘Diplomasi Publik’ awal mula muncul di sebuah surat kabar pada bulan Januari 1856 di London⁵² yang dibuat guna mengkritik kebijakan luar negeri milik Presiden Franklin Pierce yang mana diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha untuk menunjukkan atau mengumumkan kepada publik tentang kondisi politik pada saat itu. Secara definisi umum, Diplomasi Publik merupakan salah satu media yang digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dan menjaga serta mengelola hubungan dengan negara lain dan memenuhi kepentingan nasional mereka dengan cara menarik perhatian publik dari negara lain⁵³.

Dalam ber-diplomasi publik, pengaruh merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, seperti kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan keamanan, dan kepentingan sosial-budaya. Kaum rasionalis berpendapat bahwa hubungan internasional dapat diwujudkan apabila terdapat kerjasama dan dialog antar negara⁵⁴. Tujuan utama dari diplomasi publik sebenarnya adalah menyadarkan publik dan pemerintah negara lain untuk memahami pengaruh suatu negara yang mana sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Secara praktik, diplomasi budaya bisa dianggap sebagai upaya *national branding* suatu negara terhadap negara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan masyarakat negara lain terhadap suatu negara yang melakukan diplomasi budaya⁵⁵. Metode yang digunakan oleh diplomasi publik ialah dengan memanfaatkan komunikasi, globalisasi, dan

⁵² Maria Veri Diana Baun Yuel, Ariel Nethan, Ananda Dewin Ikhtiarin, Viola Marsela Agustin, Diansari Solihah Amini, Yeyen Subandi. 2023. STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA MELALUI KOREAN WAVE. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial : Vol.7 No.1.

⁵³ Ibid,. Hal. 49

⁵⁴ Iva Rachmawati. 2016. Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara. Calpulis. Hal. 17.

⁵⁵ Ibid,. Hal. 19

kemajuan teknologi⁵⁶.

Peran komunikasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi didorong oleh tujuan diplomasi publik dengan cara menekankan interaksi langsung dengan warga dan meruntuhkan kesenjangan sosial. Diplomasi publik tetap menempatkan negara sebagai aktor utama, namun negara mengarahkan opini publik terhadap kepentingan yang ingin dituju oleh suatu negara. Dengan kata lain, diplomasi publik tidak lagi menekankan komunikasi satu arah (negara ke warga), melainkan menekankan pada komunikasi dua arah untuk saling bertukar opini atau informasi antara pemerintah sebagai representasi negara dan warga atau publik. Di era globalisasi dan modernisasi, diplomasi publik tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga melalui media sosial yang dapat menjangkau interaksi dengan warga lintas negara, karena pada dasarnya diplomasi publik adalah kontak antara pemerintah suatu negara dengan publik di negara lain. Diplomasi publik diterapkan untuk mengembangkan hubungan dengan negara lain melalui aktor non-negara melalui seminar, pertukaran budaya, beasiswa, pelatihan, konferensi, dan akses saluran media⁵⁷. Diplomasi publik di era kemajuan komunikasi dan teknologi menggunakan internet dan media sosial sebagai bentuk baru dari diplomasi publik konvensional sebagai sarana dalam memperkuat hubungan diplomatik, sehingga pengaruh suatu negara dapat ter-ekspansi dengan lebih maksimal⁵⁸. Keleluasaan dalam media sosial memudahkan praktik diplomasi dan membuka ruang diskusi bebas dalam arena publik. Media sosial juga memudahkan para aktor negara untuk membangun hubungan dengan aktor negara lainnya atau publik mengenai kebijakan atau aktivitas yang dibentuk oleh suatu negara. Memperluas jaringan diplomasi yang

⁵⁶ Ibid., Hal. 21.

⁵⁷ Joseph S Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs New York. Hal.109.

⁵⁸ Iva Rachmawati & Machya Astuti Dewi & Erna Kurniawati. 2021. *Diplomasi Publik Digital*. Graha Ilmu. Hal. 8.

mana tidak hanya melibatkan para aktor negara, namun juga aktor non-negara memungkinkan adanya saling tukar informasi dan ide untuk memperlancar praktik diplomasi dan memudahkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan konsep diplomasi publik dengan alasan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah Korea dalam upaya mengekspansi budaya Korea di Indonesia melalui media sosial merupakan program-program yang melibatkan publik di Indonesia, terutama anak-anak muda penggiat budaya Korea. Oleh karena itu, terdapat relevansi konsep yang diterapkan dengan kebijakan pemerintah Korea yang diimplementasikan di Indonesia. Dalam mengimplementasikan konsep diplomasi publik ini, Korea Selatan sebagai negara yang mono-kultural mencapai kepentingan sosial-budaya dan kepentingan ekonominya di Indonesia melalui kebijakan dan program yang melibatkan budayanya, baik tradisional mau pun konvensional, dengan cara mengikut-sertakan publik Indonesia melalui media sosial.

2.1.1.1 Diplomasi Digital

Teknologi digital yang terus berkembang di tengah dinamika sosial membuat masyarakat dunia internasional berubah dan sikap kebijakan luar negeri berubah. Kemajuan digital memainkan peran penting dalam hubungan antar negara. Digitalisasi membuka ruang bagi praktik diplomatik untuk menyediakan layanan yang bersifat secara tidak langsung di tengah publik⁵⁹. Diplomasi digital merupakan bagian dari diplomasi publik yang mana proses diplomasinya banyak melibatkan aktor negara mau pun non negara dalam menyampaikan identitas, nilai,

⁵⁹ Frida Theander. *Digital Diplomacy: A Study of social media and the changing role of the diplomatic service*. Department of Political Science, Lund University.

dan kebijakan dari suatu negara⁶⁰. Hubungan antara digitalisasi dan diplomasi publik ialah muncul di saat teknologi digital mempengaruhi pelaksanaan diplomasi publik dan memfasilitasi aktivitas diplomasi publik⁶¹. Kemunculan internet dan media sosial membuat praktik negosiasi dan kegiatan kerja sama antar negara dapat diakses oleh siapa pun secara cepat. Secara tidak langsung, para pelaku diplomasi ikut beradaptasi dengan digitalisasi. Akses yang cepat membuat digitalisasi turut melibatkan banyak pihak dalam melakukan diplomasi⁶². Internet dan media sosial memiliki kemampuan untuk menghubungkan diplomat dengan populasi asing dan media sosial digunakan oleh para diplomat untuk mengatasi keterbatasan yang sebelumnya ada di diplomasi tradisional⁶³. Melalui internet, diplomat juga dapat mengukur seberapa besar opini publik dari negara lain terhadap negara mereka.

Revolusi teknologi membuat seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan internasional dan sistem global berubah. Hal tersebut membuat negara dapat mengkomunikasikan agenda politiknya kepada masyarakat dengan mudah dan cepat⁶⁴. Para pelaku diplomasi menggunakan media sosial, seperti Instagram dan Twitter untuk berbicara dan terlibat langsung kepada khalayak. Kemajuan teknologi membuat suatu negara tidak hanya menunjukkan posisi atau kondisi mereka kepada masyarakat,

⁶⁰ Habibah Hermanadi & Nitya Saputri Rizal. 2021. Memahami Diplomasi Digital : Implikasi dan Implementasi, Studi Komparasi di Uni Eropa, Brazil, India, dan Korea Selatan. Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada.

⁶¹ Ilan Manor. 2019. The Digitalization of Public Diplomacy. Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy, Switzerland. Hal. 30.

⁶² Frida Theander. Digital Diplomacy: A Study of social media and the changing role of the diplomatic service. Department of Political Science, Lund University.

⁶³ Ilan Manor. 2019. The Digitalization of Public Diplomacy. Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy, Switzerland. Hal. 30.

⁶⁴ Hayati AKTAŞ. 2021. DIGITAL DIPLOMACY AND ITS IMPLICATIONS IN THE 21st CENTURY. Journal of Antalya Diplomacy Forum

namun juga membuat mempromosikan ide-ide mereka⁶⁵. Dalam hal ini, negara atau para pelaku diplomasi menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan terlibat langsung dengan khalayak yang ingin mereka pengaruhi⁶⁶. Diplomasi digital memungkinkan negara untuk mempengaruhi aktor negara mau pun non negara dari berbagai lapisan masyarakat internasional (individu, organisasi pemerintah atau non pemerintah, kelompok etnis, kelompok agama, dan lainnya) dengan lintas yang lebih luas tanpa adanya batas ruang. Diplomasi digital yang didukung dengan adanya media sosial yang dengan bebas digunakan oleh banyak lapisan masyarakat tersebut juga dipandang sebagai alat yang membantu mereka untuk lebih mudah dalam berpendapat dan berekspresi.

Kemajuan digital membuat setiap aktor politik internasional beradaptasi dalam cara berkomunikasi dan bernegosiasi kepada publik dengan didukung kecepatan yang melewati batas jarak atau pun ruang untuk berbagi informasi, pesan, dan bahkan kebijakan serta agenda politik yang sedang mereka jalankan⁶⁷. Dengan hal ini, diplomasi digital menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang sangat berperan penting di tengah diplomasi konvensional yang juga masih banyak dilakukan. Diplomasi digital memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk ikut peran dalam melakukan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, menghilangkan batas internasional, dan mempengaruhi atau bahkan terpengaruh oleh sebuah negara tanpa harus mengunjungi negara tersebut⁶⁸.

Diplomasi digital secara tidak langsung menghapuskan atmosfer diplomasi konvensional yang cenderung kaku, formal,

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

dan birokratis ke arah diplomasi yang lebih fleksibel, transparan, dan bersifat kolaboratif atau dapat diikuti oleh siapa pun. Diplomasi digital menekan suatu negara untuk menyesuaikan praktik diplomasinya di tengah era modernisasi dengan tidak membatasi komunikasi secara vertikal antara masyarakat internasional kepada negara mau pun horizontal antara masyarakat internasional kepada masyarakat internasional lainnya tanpa mengecualikan siapa pun⁶⁹. Dengan adanya kecepatan dalam komunikasi tanpa batas ruang, diplomasi publik dianggap dapat mengubah relasi antara pemerintah atau perwakilan luar negeri dengan masyarakat, media, mau pun aktor non-negara lainnya yang ikut terlibat.

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan konsep diplomasi digital yang merupakan turunan dari diplomasi publik dengan alasan bahwa kebijakan dan program yang dijelaskan oleh penulis pada bab IV secara maksimal dijalankan langsung menggunakan media sosial, seperti Instagram, YouTube, dan Blog dalam upaya menarik perhatian publik di Indonesia agar tertarik untuk berpartisipasi dalam program-program diplomasi publik yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia dalam upaya penyebaran budaya Korea dan segala informasi kegiatan kedutaan besar Korea di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat relevansi konsep diplomasi digital yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi publiknya di Indonesia. Dalam mengimplementasikan konsep diplomasi digital ini, Korea Selatan sebagai negara yang mono-kultural mencapai kepentingan sosial-budaya dan kepentingan ekonominya di Indonesia melalui kebijakan dan program yang melibatkan

⁶⁹ Habibah Hermanadi & Nitya Saputri Rizal. 2021. Memahami Diplomasi Digital : Implikasi dan Implementasi, Studi Komparasi di Uni Eropa, Brazil, India, dan Korea Selatan. Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada

budayanya, baik tradisional mau pun konvensional, dengan cara mengikutsertakan publik Indonesia melalui media sosial Instagram, YouTube, dan Blog.

2.1.2 Teori Kepentingan Nasional (National Interest)

Kepentingan Nasional merupakan salah satu teori pusat dalam studi politik internasional karena kepentingan nasional dapat menjelaskan setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Kepentingan Nasional sangat berperan penting pada politik internasional karena dengan adanya kepentingan nasional, maka seorang pembuat kebijakan dapat mengerti tujuan yang ingin dicapai yang diwujudkan melalui kebijakan luar negeri. Selain itu, kepentingan nasional juga berguna sebagai alat retorika melalui legitimasi dan dukungan politik terhadap sebuah tindakan negara yang dihasilkan⁷⁰. Menurut argument Hans Morgenthau, suatu tatanan rasional harus dibangun di antara nilai-nilai yang menjadi kepentingan nasional. Dengan kata lain, kepentingan nasional menjadi sebuah kekuatan suatu negara yang dapat membantu negara dalam melegitimasi setiap tindakan yang diambil oleh negara⁷¹.

Kepentingan Nasional didefinisikan dengan beberapa sudut pandang dalam studi politik internasional. Dalam sudut pandang realis, umumnya kepentingan nasional disimpulkan dari konsep anarki dan merupakan bantuan terhadap diri sendiri dalam sistem internasional⁷². Menurut Morgenthau, kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara ialah bertujuan untuk melindungi negara secara fisik (serangan dari negara lain), politik, dan identitas budaya dari negara lain⁷³. Suatu negara

⁷⁰ Christopher Hill. 2013. *The National Interest in Question: Foreign Policy in Multicultural Societies*. Oxford University Press. University of Oxford. Hal 7-9.

⁷¹ Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson. 1985. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf, Inc.

⁷² Scott Burchill. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. PALGRAVE MACMILLAN, New York. Hal 32.

⁷³ *Ibid.*, Hal.33.

bertindak di dalam kepentingan nasionalnya, sehingga kepentingan nasional dinilai sebagai *power* bagi negara untuk bisa bertahan terhadap ancaman negara lain (*security interest*).

Di sisi lain, kepentingan nasional dari sudut pandang liberalis memiliki definisi yang berbeda. Menurut Adam Smith, mengejar keuntungan materi adalah hal yang normal bagi manusia dan hal tersebut membentuk struktur ekonomi dan masyarakat⁷⁴. Berbeda dengan pandangan realis yang memandang kepentingan nasional dengan sudut pandang keamanan, liberalis memandang kepentingan nasional dengan sudut pandang materi. Bagi Adam Smith, kepentingan nasional merupakan akumulasi atau gabungan dari kepentingan diri masing-masing individu⁷⁵. Kepentingan nasional selalu berputar pada keuntungan dan minat masyarakat internasional, sehingga kepentingan individu dan kepentingan nasional mencapai derajat kepentingan yang sama dan menghasilkan kebijakan publik yang terbuka dan menguntungkan. Untuk mewujudkan kepentingannya, seorang individu mendorong kepentingannya kepada masyarakat atau kelompok skala besar agar masyarakat memiliki kepentingan yang sama, dan membuat masyarakat mempromosikan kepentingannya⁷⁶. Hal tersebut menciptakan masyarakat internasional saling terkoneksi dan membuat batas-batas antar negara menjadi minim. Bagi kaum libelaris, negara ialah satu-satunya organisasi yang cenderung mempertahankan budaya politik liberal-demokratis. Kaum liberal meyakini liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi pada umumnya sangat tergantung pada negara. Liberalis memandang kepentingan nasional secara optimis yang mana kepentingan nasional dapat menciptakan masyarakat internasional yang memiliki banyak kepentingan yang berbeda bisa terlibat dalam aksi sosial yang bersifat kooperatif dan

⁷⁴ Ibid., Hal.109

⁷⁵ Ibid., Hal.109

⁷⁶ Kofi Kissi Dompere. 2014. Social Goal-Objective Formation, Democracy and National Interest: A Theory of Political Economy Under Fuzzy Rationality. Springer International Publishing Switzerland. Hal. XXI-XXII

kolaboratif dan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Menurut liberalism, kepentingan nasional harus fokus pada upaya perdamaian dan mempertahankan hubungan baik antar bangsa.

Dari kedua definisi kepentingan nasional melalui sudut pandang yang berbeda dalam politik internasional, sudut pandang liberalis sangat sejalan dengan kepentingan nasional Korea Selatan dalam melaksanakan diplomasi budayanya dengan cara melibatkan kolaborasi masyarakat untuk memperluas pengaruh budayanya di negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional, namun juga kepentingan global. Politik internasional ialah tentang *power* dan setiap negara berupaya untuk meningkatkan *power*. Power dapat didefinisikan dalam beberapa bidang, seperti ekonomi, militer atau keamanan, dan bahkan pengaruh budaya. Korea Selatan memilih pengaruh budaya sebagai salah satu medianya untuk membangun kerja sama dengan negara lain dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan membentuk citranya terhadap negara lain. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya Korea dan ikut menyebarkan budaya Korea merupakan bentuk dari kepentingan nasional Korea Selatan. Dalam kehidupan sosial, manusia kodratnya hidup dengan saling berbagi. Oleh karena itu, Korea Selatan memanfaatkan pendekatan minat masyarakat untuk tertarik terhadap budaya Korea yang dikemas secara menarik. Sistem kepentingan nasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan domestik dan kepentingan luar negeri. Kepentingan domestik memuat aspirasi internal yang memuat keinginan rakyat, sementara itu, kepentingan luar negeri yang memuat keinginan dan minat masyarakat internasional dan meningkatkan produktivitas dalam dan luar negeri.

Korea Selatan memiliki kepentingan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mendorong pluralisme budaya. Kepentingan nasional Korea Selatan di tingkat global berhubungan dengan kemakmuran Korea sebagai sebuah bangsa, kebebasan, mendorong demokrasi yang ideal, berkontribusi dalam perdamaian dunia, dan

mewujudkan unifikasi di semenanjung Korea. Dalam sektor kultural, Korea Selatan menganggap bahwa aspek budaya dapat diperluas secara global dengan menyediakan sarana diplomasi budaya melalui fenomena *Hallyu* (Korean Wave).

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan teori kepentingan nasional dengan alasan bahwa kebijakan dan program diplomasi publik yang dibentuk oleh pemerintah Korea tidak lepas dari kepentingan nasional Korea Selatan yang mana ingin memperluas informasi mengenai budaya Korea dan pengaruh Korea Selatan secara internasional, khususnya dalam penelitian ini adalah di Indonesia. Kepentingan nasional Korea Selatan dalam bidang industri hiburan dan ekonomi juga yang menjadi penggerak pemerintah Korea Selatan untuk secara maksimal membentuk kebijakan dan program yang melibatkan Masyarakat agar penyebaran budayanya dapat menjangkau publik di Indonesia secara lebih langsung dan meluas. Oleh karena itu, terdapat relevansi teori kepentingan nasional yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan melalui diplomasi publiknya di Indonesia. Dalam mengimplementasikan teori kepentingan nasional ini, Korea Selatan sebagai negara yang mono-kultural mencapai kepentingan sosial-budaya dan kepentingan ekonominya di Indonesia melalui kebijakan dan program yang melibatkan budayanya, baik tradisional mau pun konvensional, dengan cara mengikut-sertakan publik Indonesia melalui media sosial Instagram, YouTube, dan Blog.

2.3 Analisis Gap Teoritis

Melalui kelima penelitian terdahulu yang telah dikaji dan dijabarkan, penulis menyadari bahwa terdapat gap di mana kelima penulis sama-sama belum mengkaji lebih dalam bagaimana dan seberapa efektif keberhasilan dari praktik diplomasi publik Korea di Indonesia bagi kepentingan nasional mereka, khususnya pada kepentingan ekonomi Korea Selatan. Dalam aspek budaya, seperti

yang telah diketahui oleh khayalak umum, budaya Korea sangat masif menyebar ke banyak negara, salah satunya Indonesia. Ditandai dengan banyaknya generasi muda di Indonesia yang menggemari idol K-Pop dan mempelajari Bahasa serta kebudayaan Korea Selatan. Meskipun efektifitas dari praktik *soft power* pasti akan selalu ada gap antara sumber daya dan outcome dari power itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Joseph Nye, namun Nye berpendapat bahwa efektivitas soft power dapat diukur dengan menggunakan polling melalui media sosial atau focus group discussion untuk dapat melihat dampak opini publik pada negara objek, seperti kebijakan luar negerinya⁷⁷. Terutama pada jurnal yang pertama, yaitu “Korean Wave : Diplomasi Publik dan Budaya Korea Selatan terhadap Indonesia” yang mana hanya menjelasnya apa saja organisasi atau institusi yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia dan bagaimana mereka menjalankan perannya tanpa mengkaji seberapa besar pengaruh mereka bagi kepentingan nasional Korea Selatan.

Diplomasi publik juga tidak hanya diplomasi satu arah, namun diplomasi yang bisa dilakukan dua arah karena bersangkutan dengan banyak orang dari berbagai aktor. Dalam dua jurnal sebelumnya ini, kurang dikaji dan dijelaskan apakah diplomasi publik dua arah terjadi dan bagaimana implementasinya pada praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu kelima yang berjudul ‘Diplomasi Budaya Korea Selatan di Indonesia’, penulis menjelaskan berapa nilai investasi Korea Selatan di Indonesia dalam beberapa bidang seperti kesehatan, kecantikan, otomotif, elektronik, dan pariwisata. Jurnal penelitian ini sedikit memberikan gambaran bagi penelitian yang sedang dijalani karena sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan. Namun, dalam hal ini, penelitian saat ini akan mengkaji bagaimana pengaruh diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan di Indonesia terhadap kepentingan ekonomi dan sosial-budayanya.

Beberapa jurnal penelitian tidak membahas secara jelas bagaimana peran

⁷⁷ Rachmawati, Iva. 2016. Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara. Calpulis. Hal. 41.

publik melalui media sosial, atau sejauh mana keuntungan yang diwujudkan oleh Korea Selatan dari praktik diplomasi publik yang dilakukannya di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berharap bisa mengkaji lebih dalam sejauh mana peran publik di Indonesia terhadap penyebaran budaya Korea Selatan di Indonesia, bagaimana kebijakan dan program yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan diplomasi publiknya, dan bagaimana pengaruh diplomasi publik yang dilakukan terhadap kepentingan ekonomi dan sosial-budaya Korea Selatan.

